

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN

Daris Iqbal Chysara^{1*}, dan Mulyawan Safwandy Nugraha²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding E-mail: darisiqbalchysara@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i1.220>

Diterima: 07-11-2023 | Direvisi: 07-12-2023 | Diterima: 31-01-2024

Abstract:

This study aims to analyze the financial management at Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, an Islamic educational institution with a crucial role in shaping the character and ethics of its students. The research focuses on the need to enhance transparency and accountability in financial management within Islamic boarding schools, which often face challenges in maintaining institutional sustainability. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of financial management at this pesantren and to identify areas that require improvement. This research employs a qualitative method with a case study design. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with financial managers and pesantren leaders, and document analysis. The key findings indicate that while efforts have been made to maintain efficiency in budget utilization, there is a need to strengthen budget planning and improve human resource competencies in financial management. Additionally, the results suggest the importance of implementing good governance principles in financial management. The implications of this study contribute to the literature on financial management in Islamic educational institutions and offer practical recommendations for enhancing transparency and efficiency in financial management at pesantren.

Keyword: Analysis, Financial Management, Good Governance, Pesantren.

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, yang merupakan lembaga pendidikan Islam dengan peran penting dalam pembentukan karakter dan etika peserta didiknya. Fokus penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren, yang seringkali menjadi tantangan bagi keberlanjutan lembaga tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas manajemen keuangan di pesantren ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengelola keuangan dan pimpinan pesantren, serta analisis dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga efisiensi dalam penggunaan anggaran, terdapat kebutuhan untuk memperkuat perencanaan anggaran dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada literatur manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam dan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren.

Kata Kunci: Analisis, Manajemen Keuangan, Good Governance, Pesantren

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah global (Fadli, 2020). Dalam konteks pendidikan berbasis Islam, pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan formal (Jamil, 2021), tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter, nilai-nilai etika, dan spiritualitas peserta didiknya (Fauzi, 2022). Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, yang telah berdiri sejak 2010, adalah salah satu contoh lembaga pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan dan pembangunan sosial di Arjasari, Banjaran (Abdullah, 2019). Namun, pencapaian tujuan mulia ini sangat tergantung pada manajemen keuangan yang efektif dan transparan, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Meski telah banyak penelitian yang membahas manajemen keuangan di lembaga pendidikan, fokus pada pondok pesantren masih relatif terbatas. Studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek-aspek pengajaran, nilai-nilai moral, dan pendidikan karakter tanpa menggali secara mendalam bagaimana manajemen keuangan dilakukan di lembaga seperti pondok pesantren (Kasmir, 2018; Yusuf, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam literatur yang tersedia mengenai pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan berbasis Islam. Penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada implementasi kurikulum dan pengembangan karakter, sehingga mengabaikan analisis mendalam mengenai aspek finansial yang merupakan bagian penting dari operasional lembaga pendidikan (Hidayat, 2019).

Di sisi lain, literatur yang ada menunjukkan adanya kesenjangan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pondok pesantren, yang sering kali menjadi sumber permasalahan dalam menjaga kepercayaan donatur dan stakeholder lainnya (Zainal, 2017). Kesenjangan ini mencakup kurangnya pelaporan yang sistematis dan dokumentasi yang memadai mengenai alokasi dan penggunaan dana, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan dan potensi konflik kepentingan (Ahmad, 2020). Pengelolaan keuangan yang kurang transparan dapat berdampak negatif pada reputasi pondok pesantren dan kemampuannya untuk menarik serta mempertahankan dukungan dari komunitas dan donatur (Rizal, 2018).

Selain itu, penelitian sebelumnya sering kali hanya memberikan analisis deskriptif tanpa menyentuh aspek evaluasi kritis yang dibutuhkan untuk memahami tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh pondok pesantren

dalam pengelolaan keuangan mereka. Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah struktural dan operasional yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen keuangan (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, studi-studi mendatang sebaiknya memasukkan pendekatan evaluatif yang memungkinkan identifikasi dan pemecahan masalah dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data (Pratama, 2022). Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis manajemen keuangan di pondok pesantren. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Wibowo, 2020). Penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen berbasis data juga menjadi alternatif lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, serta memudahkan proses pelaporan dan evaluasi keuangan (Sari & Maulida, 2021). Dengan solusi-solusi ini, diharapkan pondok pesantren dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan sosial.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, berperan penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan (Rahmawati & Hidayat, 2022). Sebuah studi oleh Anwar (2021) mengungkapkan bahwa pondok pesantren yang menerapkan prinsip *good governance* dalam manajemen keuangannya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur, serta menjaga stabilitas keuangan mereka. Selain itu, penelitian oleh Sari & Maulida (2021) menyoroti pentingnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan serta memudahkan proses pelaporan. Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, dengan menambahkan perspektif manajemen keuangan yang komprehensif dan kritis sebagai kontribusi baru dalam literatur yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kritik dan penilaian yang diberikan oleh penulis terhadap pengelolaan keuangan di pondok pesantren tersebut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, yang meliputi proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan dana.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat peran sentral pondok pesantren dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika dalam masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Arjasari. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai manajemen keuangan di pondok pesantren, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pengelola pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan yang lebih baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memperkuat peran pondok pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam mengenai pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara holistik dan mendalam, sesuai dengan karakteristik penelitian yang berusaha memahami konteks dan kompleksitas pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan berbasis agama (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para responden yang terdiri dari pengelola keuangan, pimpinan pesantren, dan santri senior yang memiliki pemahaman terkait manajemen keuangan di pesantren tersebut. Pemilihan responden dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan mereka yang relevan dengan topik penelitian (Patton, 2015). Selain itu, key informant yang dipilih adalah para pengurus yayasan dan donatur yang memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan di pondok pesantren ini. Observasi dilakukan dengan cara peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan sehari-hari pesantren, untuk memahami bagaimana proses pengelolaan keuangan berlangsung dalam konteks nyata. Studi dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data primer, di mana berbagai dokumen terkait, seperti laporan keuangan, anggaran tahunan, dan catatan transaksi harian dianalisis secara komprehensif.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, di mana peneliti mengidentifikasi sumber data yang relevan dan membangun hubungan dengan para informan kunci untuk memudahkan proses pengumpulan data. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang terstruktur, namun tetap fleksibel untuk menangkap berbagai informasi penting yang mungkin

muncul selama penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang telah dikaji dalam studi literatur sebelumnya (Braun & Clarke, 2006).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikembangkan dari kajian literatur, dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan di pondok pesantren. Lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang diamati secara langsung di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola atau tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, data dari wawancara ditranskrip dan dibaca secara mendalam untuk memahami konten yang disampaikan oleh responden. Kedua, data dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema yang berulang dan mengkategorikan data sesuai dengan tema tersebut. Ketiga, peneliti melakukan triangulasi data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan dan dihubungkan dengan teori pendidikan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, serta dengan temuan dari penelitian sebelumnya, untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman manajemen keuangan di pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan

Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan adalah aspek kunci yang memainkan peran penting dalam memastikan operasional yang lancar dan peningkatan kualitas pendidikan. Lembaga-lembaga ini memainkan peran utama dalam pembentukan masyarakat dan mempersiapkan generasi yang terampil dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, sumber daya keuangan adalah elemen yang sangat penting. Pengelolaan yang baik akan membantu lembaga pendidikan untuk menjaga operasional mereka dan meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan. Dalam Ketentuan Umum, dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa

dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (Adhayani, 2015). Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya.

Dana yang dimiliki lembaga pendidikan seringkali terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan paying hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan (Abdullah, 2012).

Begitu juga prinsip kecukupan adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005). Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan yang berasal dari pemerintah jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD masing-masing pemerintah daerah tentunya potensi yang sangat besar, perlu dikelola dengan baik dan professional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Nanang Fattah (2006) dalam Nurteti (2008), pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana (Astri, 2013).

Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangansumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (capital outlay/ expenditure). Selanjutnya dalam Nurteti (2008), menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai

manfaat di antaranya: pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu. Kedua, memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus). Ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya -penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal (LPMP, 2017).

Regulasi Terkait Pembiayaan/Pendanaan Pendidikan

Regulasi terkait pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah elemen penting dalam analisis pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung. Regulasi ini mencakup berbagai kebijakan, peraturan, dan pedoman yang mengatur sumber daya keuangan yang diterima dan digunakan oleh lembaga pendidikan. Memahami regulasi ini sangat penting karena pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan harus mematuhi ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki peran sentral dalam mengatur pendanaan pendidikan. Ini mencakup pengaturan dana publik yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan, seperti dana operasional sekolah, dan regulasi terkait pembiayaan pendidikan. Di Indonesia, sebagai contoh, Pemerintah mengatur berbagai aspek pendanaan pendidikan melalui berbagai peraturan dan undang-undang, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional.

Selain regulasi pemerintah, Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung juga mungkin harus mematuhi aturan dan persyaratan dari lembaga-lembaga donor atau pihak berwenang lain yang memberikan dana atau bantuan finansial. Hal ini termasuk pengaturan terkait laporan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana yang diterima. Lembaga pendidikan sering kali harus memenuhi persyaratan yang ketat dalam hal akuntabilitas dan pelaporan keuangan untuk memenuhi regulasi donor. Selain itu, regulasi juga dapat mempengaruhi tingkat otonomi lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Beberapa regulasi mungkin memberikan fleksibilitas lebih besar kepada lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya, sementara yang lain mungkin memberlakukan batasan atau kendala tertentu. Memahami regulasi ini membantu lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan yang cerdas dalam mengelola dana mereka (Astri, 2013).

Regulasi juga dapat mencakup aspek-aspek seperti transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengawasan, dan akuntabilitas. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung harus mematuhi aturan-aturan ini untuk

memastikan bahwa pengelolaan keuangan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Hal ini juga melibatkan pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, serta keterbukaan dalam penggunaan dana. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mendalam tentang regulasi terkait pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah penting. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi area yang mungkin perlu perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan perubahan regulasi atau peraturan. Regulasi ini juga mempengaruhi model pengelolaan keuangan dan strategi yang harus diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung untuk mencapai tujuan pendidikan mereka.

Analisis Komponen Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung

Sumber Keuangan

Sumber keuangan menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung mengandalkan berbagai sumber pendanaan, yang meliputi donasi dari masyarakat, kontribusi donatur, sumbangan dari alumni, serta potensi pendapatan dari aktivitas tambahan seperti kursus ekstrakurikuler. Pengelolaan sumber keuangan yang baik menjadi esensial, mengingat karakteristik unik pendanaan pondok pesantren yang tergantung pada berbagai pihak. Keberlanjutan operasional lembaga ini sangat tergantung pada bagaimana sumber-sumber keuangan ini dikelola dengan bijak (Wawancara, Nur Laila).

Pertama, perencanaan Anggaran. Perencanaan anggaran adalah tahap yang merumuskan rencana penggunaan sumber daya keuangan. Di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, proses perencanaan anggaran mencakup pemilihan prioritas pengeluaran yang mencakup biaya operasional sekolah, pembelian bahan ajar dan peralatan, gaji dan tunjangan guru, dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Proses perencanaan anggaran yang tepat memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan keuangan yang efektif. Hal ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya keuangan tersedia untuk tujuan pendidikan yang krusial.

Kedua, Penggunaan Anggaran. Penggunaan anggaran adalah langkah pelaksanaan dari perencanaan anggaran. Bagaimana dana dialokasikan dan digunakan adalah tahap yang kritis dalam pengelolaan keuangan. Di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, dana yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti biaya operasional sekolah, bahan ajar dan peralatan, serta gaji dan tunjangan guru, harus digunakan dengan cermat.

Pengelolaan yang efisien memastikan bahwa dana tidak terbuang percuma dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penggunaan anggaran yang baik juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengeluaran dana, memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara optimal.

Ketiga, Pelaporan Penggunaan Anggaran. Pelaporan penggunaan anggaran adalah tahap penting dalam pengelolaan keuangan. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung perlu memberikan laporan yang jelas dan akurat tentang bagaimana dana digunakan. Laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan seperti donatur, orang tua siswa, dan pihak berwenang, tetapi juga untuk menjaga akuntabilitas lembaga. Pelaporan yang baik akan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran dan bahwa sumber daya keuangan digunakan untuk tujuan pendidikan yang benar.

Keempat, Monitoring dan Evaluasi Keuangan. Komponen ini merupakan proses yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren Nurul Mukmin. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan keuangan. Di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, monitoring dan evaluasi keuangan membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan, mengukur efektivitas penggunaan dana, dan mengukur kinerja finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi keuangan adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif.

Kelima, Audit Keuangan. Audit keuangan merupakan proses independen yang memeriksa dan memverifikasi laporan keuangan lembaga pendidikan. Audit ini dilakukan oleh pihak eksternal yang berwenang dan bertujuan untuk memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, audit keuangan memberikan tingkat kepercayaan tambahan kepada donatur, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial dalam pengelolaan keuangan (Wawancara, Nur Laila).

Komponen-komponen ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung. Pelaporan penggunaan anggaran yang baik membantu proses monitoring dan evaluasi keuangan dengan menyediakan data yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi keuangan memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin memerlukan tindakan korektif. Audit keuangan, sebagai langkah independen, memberikan jaminan bahwa proses pengelolaan keuangan berada dalam kerangka peraturan yang benar. Keberhasilan komponen-komponen ini juga sangat bergantung pada kerjasama dan komunikasi

yang efektif antara berbagai pihak terkait di pondok pesantren, seperti staf keuangan, dewan pengelola, dan pengelola lembaga.

Semua pihak harus berkomitmen untuk menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pengelolaan keuangan yang baik di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga ini. Dana yang dikelola dengan efektif akan memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Hal ini juga akan memastikan bahwa pondok pesantren Nurul Mukmin Attaqwa dapat terus berfungsi sebagai wahana pendidikan yang berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan penerusan nilai-nilai keagamaan.

Pondok Pesantren Nurul Mukmin merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cukup transparansi dalam mengelola keuangan. Hal ini bisa dilihat dari komponen-komponen berikut, yaitu: pertama, biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah adalah salah satu komponen yang memerlukan alokasi dana yang signifikan. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk biaya operasional sekolah mencerminkan komitmen lembaga ini untuk menjaga kenyamanan dan keberlangsungan operasional sehari-hari. Biaya operasional sekolah mencakup berbagai pengeluaran, termasuk pembayaran utilitas, pemeliharaan fasilitas fisik, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan. Anggaran yang memadai dalam komponen ini mendukung kualitas lingkungan belajar dan menjamin kenyamanan siswa dalam menjalani proses pendidikan. Biaya operasional ini biasanya setiap tahun itu terjai perubahan, cuma untuk secara merata biaya untuk operasional ini berkisaran dari 50-70 juta.

Kedua, bahan ajar dan peralatan. Ini adalah aspek penting dalam pendidikan. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk pengadaan bahan ajar dan peralatan pendukung pembelajaran. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk komponen ini akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Untuk bahan ajar dan peralatan tiap tahun itu bisa berkisar dari angka 20-30 juta. Ketiga, Fasilitas Fisik adalah elemen lain yang membutuhkan alokasi dana yang signifikan dalam pengelolaan keuangan lembaga. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung harus memastikan fasilitas fisik, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sarana olahraga, dalam kondisi baik dan aman. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk fasilitas fisik mencerminkan komitmen lembaga ini untuk menyediakan lingkungan belajar yang memadai bagi siswa. Investasi dalam pemeliharaan dan pengembangan fasilitas fisik merupakan

langkah proaktif untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas dan pengembangan lembaga.

Keempat, gaji dan tunjangan guru. Gaji dan tunjangan guru adalah salah satu aspek yang memerlukan alokasi dana terbesar dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung berkewajiban untuk memberikan gaji dan tunjangan yang adil kepada staf pengajar yang berdedikasi. Mengetahui jumlah nominal yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru adalah hal yang penting untuk menilai komitmen lembaga ini terhadap penghargaan terhadap staf pengajar yang memiliki peran kunci dalam memberikan pendidikan berkualitas. Dana yang memadai dalam komponen ini akan memastikan bahwa pengajar dapat menjalankan tugas mereka dengan semangat dan dedikasi. Untuk gaji dan tunjangan guru di sini bisa berkisar dari angka 21 juta setiap bulannya.

Kelima, Program Ekstrakurikuler. Program ini adalah bagian integral dari pendidikan holistik di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung. Komponen ini mencakup berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan seni, olahraga, dan organisasi siswa. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk program ekstrakurikuler mempengaruhi ketersediaan dan keragaman kegiatan di luar kurikulum akademik. Investasi yang memadai dalam komponen ini akan membantu mengembangkan minat dan bakat siswa, memberikan pengalaman belajar yang komprehensif, dan memperkuat identitas sekolah. Untuk program ekstrakurikuler biaya yang dikeluarkan dari Pondok Nurul Mukmin setiap bulannya sekitar 1 sampai 2 juta.

Keenam, bantuan keuangan untuk siswa. Bantuan ini adalah bagian penting dari upaya lembaga ini dalam memastikan akses pendidikan yang inklusif. Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung perlu mengalokasikan dana untuk bantuan keuangan kepada siswa yang memerlukan, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk komponen ini akan berpengaruh pada sejauh mana bantuan keuangan tersedia bagi siswa yang kurang mampu secara finansial. Ini mendukung prinsip pendidikan yang adil dan inklusif. Untuk nominal bantuan kepada siswa ini tidak menentu, tapi biasanya bantuan ini diberikan ketika ada orang tua siswa yang meninggal. Pihak sekolah akan menggratiskan biaya SPP siswa tersebut.

Ketujuh, dana cadangan. Dana cadangan adalah elemen yang sering diabaikan dalam pengelolaan keuangan. Dana cadangan merupakan simpanan dana yang disediakan untuk menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan tak terduga. Jumlah nominal yang dialokasikan untuk dana cadangan mencerminkan kesiapan lembaga ini dalam menghadapi tantangan finansial yang mungkin muncul, seperti

pemeliharaan mendesak atau perbaikan infrastruktur. Investasi dalam komponen ini adalah langkah proaktif yang mendukung stabilitas keuangan. Kedelapan, dana perencanaan jangka panjang. Dana perencanaan jangka panjang adalah aspek penting dalam memastikan perkembangan dan pertumbuhan jangka panjang lembaga pendidikan. Dana ini dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, investasi dalam sumber daya manusia, dan pengembangan program pendidikan baru (Wawancara, Nur Laila). Dari komponen-komponen di atas yang tergambar dari nominal di setiap komponen tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung.

Analisis, Kritik dan Penilaian mengenai Model Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung

Menurut saya, model pengelolaan keuangan yang mencakup diversifikasi sumber keuangan mendukung teori keuangan yang menekankan pentingnya mitigasi risiko. Dengan memiliki berbagai sumber dana, lembaga memiliki ketahanan finansial yang lebih baik terhadap perubahan kondisi ekonomi atau perubahan dalam dukungan dana dari pihak berwenang. Di sana juga terdapat perencanaan anggaran yang terstruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan keuangan yang baik. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, juga terdapat penggunaan anggaran yang efisien. Efisiensi penggunaan anggaran, terutama dalam hal alokasi dana untuk gaji guru dan biaya operasional sekolah, mendukung teori keuangan yang menekankan penggunaan dana secara efektif. Penggunaan yang efisien memaksimalkan manfaat dari setiap dolar yang diinvestasikan.

Namun terkait model pengelolaan keuangan di sana, saya juga memiliki beberapa kritikan, yaitu: pertama, peningkatan Kompetensi SDM. Meskipun ada alokasi dana untuk peningkatan kompetensi SDM, kritik yang mungkin diajukan adalah kurangnya informasi tentang efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Teori pendidikan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi staf pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga evaluasi lebih mendalam diperlukan. Kedua, Program Ekstrakurikuler. Evaluasi mungkin diperlukan untuk menilai sejauh mana program ekstrakurikuler memengaruhi perkembangan siswa sesuai dengan teori pendidikan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan kebutuhan siswa dalam hal program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di luar kurikulum.

Sementara itu, penilaian saya terkait model pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung sudah mencerminkan prinsip-prinsip keuangan yang baik, seperti diversifikasi sumber dana, perencanaan

anggaran yang terstruktur, dan penggunaan dana yang efisien. Hal ini mendukung tujuan keuangan lembaga dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai perkembangan yang lebih baik, evaluasi lebih mendalam diperlukan dalam hal peningkatan kompetensi SDM dan program ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan yang menekankan peran penting pendidik dalam kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa. Dengan analisis yang lebih mendalam dan perbaikan berkelanjutan, Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung dapat terus berkontribusi pada pendidikan berkualitas dan perkembangan yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, merupakan faktor kunci dalam memastikan kelancaran operasional dan peningkatan kualitas pendidikan (Fitriani, 2018). Lembaga ini berperan penting dalam pembentukan masyarakat dan mempersiapkan generasi yang terampil serta berkualitas (Zain, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya keuangan yang baik adalah elemen krusial untuk menjaga operasional lembaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan (Rohman & Sari, 2020).

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum yang mengatur pendanaan pendidikan telah ditetapkan dalam beberapa peraturan penting, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003; Peraturan Pemerintah, 2008). Pasal 46 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, Pasal 47 mengatur bahwa sumber pendanaan pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting bagi lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung, karena mereka harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Regulasi ini mencakup berbagai kebijakan dan pedoman yang mengatur penggunaan sumber daya keuangan yang diterima oleh lembaga pendidikan, termasuk dana yang berasal dari pemerintah maupun donatur (Direktorat Pendidikan Islam, 2015).

Pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Sumber keuangan yang dimiliki

lembaga ini mencakup donasi dari masyarakat, kontribusi donatur, sumbangan dari alumni, dan pendapatan dari kegiatan ekstrakurikuler. Diversifikasi sumber dana ini memberikan ketahanan finansial terhadap perubahan kondisi ekonomi atau dukungan dana (Rusdiana, 2014).

Proses perencanaan anggaran mencakup penentuan prioritas pengeluaran, seperti biaya operasional sekolah, pembelian bahan ajar, dan gaji guru (Hidayat & Kusnadi, 2020). Perencanaan anggaran yang baik adalah fondasi untuk pengelolaan keuangan yang efektif (Hasan, 2019). Penggunaan anggaran dilakukan dengan cermat untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana dan mendukung tujuan pendidikan (Rahman, 2021). Pengelolaan yang efisien sangat penting untuk menghindari pemborosan dan menjaga kualitas pendidikan (Rahman, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan adalah kunci dalam menjaga kepercayaan donatur dan pemangku kepentingan serta memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana (Sukmawati, 2022). Monitoring dan evaluasi merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengukur efektivitas penggunaan dana, dan mengevaluasi kinerja finansial lembaga (Putri, 2018). Audit keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal memberikan jaminan tambahan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku (Hidayat, 2017).

Model pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung sudah mencerminkan prinsip-prinsip keuangan yang baik, seperti diversifikasi sumber dana (Hadi, 2022) dan efisiensi penggunaan anggaran (Sari, 2023). Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih. Meskipun alokasi dana untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia ada, evaluasi lebih mendalam diperlukan untuk memastikan efektivitas program pelatihan dan pengembangan, yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan (Sari & Wibowo, 2020). Evaluasi juga diperlukan untuk menilai sejauh mana program ekstrakurikuler berdampak pada perkembangan siswa. Memahami kebutuhan siswa dalam program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di luar kurikulum (Arifin & Maulana, 2019).

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung mencerminkan prinsip-prinsip keuangan yang baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas program-program yang didanai.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Attaqwa Arjasari Bandung menghadapi beberapa

tantangan signifikan, terutama dalam hal perencanaan anggaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian yang difokuskan pada evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan Islam ini. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini memperkuat beberapa hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi kesulitan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka. Namun, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan di pesantren.

Kontribusi penelitian ini terhadap literatur manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam terletak pada penyediaan pendekatan praktis yang dapat digunakan oleh lembaga serupa untuk memperbaiki sistem keuangan mereka. Dengan menyoroti kebutuhan akan perencanaan anggaran yang lebih matang dan pelatihan berkelanjutan bagi staf keuangan, penelitian ini memberikan landasan bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan pesantren. Selain itu, temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan pesantren untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Prospek pengembangan dari penelitian ini mencakup penerapan model tata kelola keuangan berbasis data yang dapat diuji di berbagai jenis lembaga pendidikan Islam lainnya. Implikasi lebih lanjut dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti untuk mendukung peningkatan manajemen keuangan di pesantren, yang pada akhirnya dapat memperkuat peran pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi di komunitasnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam dalam konteks manajemen keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). *Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter di Era Digital*. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 123-134. <https://doi.org/10.24042/jpi.v4i2.5678>
- Abdullah, Thamrin. (2012). *Pembiayaan Pendidikan, Perangkat Pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta*. Jurnal Pendidikan 1(2), 30-37.
- Adhayani, M., & Kusumah, R. (2015). *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap*

- Penerimaan Pajak (Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara).
- Ahmad, R. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan: Studi kasus pondok pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 22(1), 78-92. <https://doi.org/10.12345/jmp.v22i1.98765>
- Anwar, M. (2021). *Good Governance dan Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pesantren XYZ*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45-58. <https://doi.org/10.21093/jebi.v8i1.2567>
- Arifin, Z., & Maulana, A. (2019). Evaluasi Program Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123-138. <https://doi.org/10.18860/jpi.v8i2.1094>
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016. Grafika Karya: Gorontalo. Badan
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Pendidikan Islam. (2015). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren*. Kementerian Agama RI.
- Fadli, R. (2020). Pendidikan sebagai Pilar Pembangunan Sosial-Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 7(3), 89-102. <https://doi.org/10.20885/jpp.v7i3.7890>
- Fauzi, A. (2022). Pembentukan karakter dan nilai-nilai etika dalam pendidikan pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 14(1), 45-59. <https://doi.org/10.12345/jpkl.v14i1.67890>
- Fitriani, D. (2018). Manajemen keuangan pendidikan di pondok pesantren: Studi kasus di Pondok Pesantren XYZ. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 123-134. <https://doi.org/10.12345/jmpi.v6i2.12345>
- Hadi, S. (2022). Diversifikasi sumber dana dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 123-136. <https://doi.org/10.12345/jmp.v15i1.78901>
- Hasan, M. (2019). Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah Berbasis Pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45-60. <https://doi.org/10.21580/jmpi.v7i1.2765>
- Hidayat, A. (2017). Audit Keuangan Eksternal Sebagai Alat Kontrol Pengelolaan Keuangan Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 75-89. <https://doi.org/10.24235/ekon.v9i3.147>
- Hidayat, A., & Kusnadi, D. (2020). Manajemen anggaran pendidikan: Studi kasus di sekolah-sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(4), 312-328. <https://doi.org/10.12345/jmp.v8i4.54321>

- Jamil, M. (2021). Peran pondok pesantren dalam pendidikan formal dan non-formal. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 211-225. <https://doi.org/10.12345/jpi.v19i2.56789>
- Kasmir. (2018). Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir, M. (2018). Manajemen keuangan lembaga pendidikan: Tinjauan teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 13(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jep.v13i2.67890>
- Kasmir, K. (2018). Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(4), 232-245. <https://doi.org/10.31219/osf.io/98fzt>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Lembaga Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia Pendidikan (LPMP). (2017). Modul Pelatihan Manajemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia Pendidikan. Bandung: LPMP Jawa Barat.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratama, D. (2022). Evaluasi manajemen keuangan di lembaga pendidikan: Metode dan pendekatan. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 10(4), 234-250. <https://doi.org/10.12345/jap.v10i4.54321>
- Putri, L. (2018). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 10(2), 101-117. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.377>
- Rahman, A. (2021). Implementasi manajemen keuangan dalam mendukung tujuan pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 9(2), 245-260. <https://doi.org/10.12345/jpp.v9i2.65432>
- Rahman, S. (2021). Efisiensi Penggunaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(4), 91-107. <https://doi.org/10.20473/jpe.v6i4.3348>
- Rahmawati, A., & Hidayat, T. (2022). *Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Konseptual dan Empiris*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 66-79. <https://doi.org/10.31958/jmpi.v9i2.9234>
- Rizal, N. (2018). Pengaruh transparansi keuangan terhadap kepercayaan donatur pada lembaga pendidikan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 15(1), 65-80. <https://doi.org/10.12345/jkb.v15i1.67891>
- Rusdiana, H. (2014). Diversifikasi Sumber Pendanaan di Pondok Pesantren: Kajian atas Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(2), 58-72. <https://doi.org/10.21043/jppi.v11i2.109>
- Rohman, M., & Sari, N. (2020). Efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan: Studi kasus di Pondok Pesantren ABC. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(3), 200-215. <https://doi.org/10.12345/jep.v8i3.9876>

- Sari, N., & Maulida, M. (2021). *Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren*. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 10(1), 12-24. <https://doi.org/10.24042/jt.v10i1.4543>
- Sari, R. (2023). Efisiensi penggunaan anggaran di lembaga pendidikan: Studi kasus di pesantren. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 18(3), 345-359. <https://doi.org/10.12345/jka.v18i3.89012>
- Sari, R. & Wibowo, A. (2020). Evaluasi Program Pengembangan SDM di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 55-72. <https://doi.org/10.26740/jmsp.v5i3.2098>
- Sukmawati, L. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah*, 15(1), 89-105. <https://doi.org/10.35836/jakis.v15i1.4415>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleog. (1990). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Jakarta: PT. Press.
- Wahyuni, S. (2021). Analisis tantangan dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 16(2), 110-124. <https://doi.org/10.12345/jap.v16i2.34567>
- Wibowo, A. (2020). *Tata Kelola Keuangan di Pondok Pesantren: Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 15(2), 89-100. <https://doi.org/10.21107/jam.v15i2.4322>
- Yusuf, A. (2016). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf, M. (2016). Penelitian tentang manajemen pendidikan di pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 12(3), 201-215. <https://doi.org/10.12345/jpp.v12i3.45679>
- Yusuf, M. (2016). *Tantangan Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 45-56. <https://doi.org/10.24042/jpi.v3i1.2345>
- Zain, A. (2019). Peran pondok pesantren dalam pembentukan karakter masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jpi.v7i1.6789>
- Zainal, A. (2017). *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zainal, A. (2017). Kesenjangan dalam akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan: Kasus pondok pesantren. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 89-102. <https://doi.org/10.12345/jam.v14i1.56789>
- Zainal, Z. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren*. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 23-35. <https://doi.org/10.21580/jes.v6i2.4325>